

Efektivitas Kerja Perangkat Desa dalam Penyelesaian Administrasi di Desa Bawosaloo Dao-Dao Kecamatan Hilimegai

Darman Syukur Putra Waruwu^{1*}, Meiman Hidayat Waruwu², Eliagus Telaumbanua³, Maria Magdalena Bate'e⁴

^{1*,2,3,4} Universitas Nias, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Corresponding Email : darmansyukurputraw@gmail.com^{1*}

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosaloo'o Dao-Dao Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. Namun, efektivitas kerja perangkat desa seringkali belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, lemahnya disiplin kerja, dan kurangnya penerapan teknologi informasi. Fokus penelitian ini mencakup tingkat efektivitas kerja perangkat desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian administrasi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kerja perangkat desa dipengaruhi oleh kompetensi individu, budaya organisasi, kepemimpinan, serta sistem dan prosedur kerja yang diterapkan. Rendahnya tingkat kehadiran dan disiplin kerja perangkat desa menjadi tantangan utama yang memengaruhi penyelesaian administrasi. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, penerapan teknologi informasi, serta perbaikan budaya organisasi dan kepemimpinan.

Kata kunci: Efektivitas Kerja; Perangkat Desa; Administrasi Desa; Budaya Organisasi; Kepemimpinan.

Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of village apparatus work in completing administration in Bawosaloo'o Dao-Dao Village, Hilimegai District, South Nias Regency. Villages as the leading government unit have an important role in providing effective public services to the community. However, the effectiveness of village apparatus work is often not optimal due to limited human resources, lack of training, weak work discipline, and lack of application of information technology. The focus of this study includes the level of effectiveness of village apparatus work and factors that influence the completion of village administration. The research method used is a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and documentation. This study found that the effectiveness of village apparatus work is influenced by individual competence, organizational culture, leadership, and the work systems and procedures applied. The low level of attendance and work discipline of village apparatus are the main challenges that affect the completion of administration. This study is expected to provide strategic recommendations to improve the effectiveness of village apparatus work through training, competency development, application of information technology, and improvement of organizational culture and leadership.

Keywords: Work Effectiveness; Village Apparatus; Village Administration; Organizational Culture; Leadership.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal-usul dan hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6, 2014). Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, dipimpin oleh seorang Kepala Desa (KBBI, 2008). Proses pembentukan desa harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Perangkat desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa memiliki peran yang sangat vital dalam kemajuan desa, namun terkadang masih terdapat perangkat desa yang memiliki sumber daya manusia yang belum memenuhi kriteria.

Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan aparat desa yang benar-benar kompeten dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga diberi tugas dalam bidang administrasi memiliki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah, mereka mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya (Pasolong, 2019). Informasi yang diperoleh kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan untuk mendukung pengambilan kebijakan daerah maupun nasional guna memenuhi kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Kepala desa pun dituntut untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas agar kegiatan pemerintahan desa dapat berjalan lebih lancar. Pemerintahan desa diatur oleh berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta beberapa perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, terdapat juga peraturan terkait pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan peraturan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah No. 43, 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83, 2015). Secara umum, efektivitas mengacu pada suatu kondisi yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan, yang mencerminkan bagaimana pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik atau tidak, tergantung pada cara dan kualitas penyelesaian tugas tersebut (Siagin, 2019). Efektivitas juga terkait dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan dalam sektor publik, terutama yang berpengaruh pada kemampuan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Robbins, 2019).

Dalam hal penyelesaian administrasi desa, efektivitas kerja perangkat desa sangat bergantung pada kompetensi, keterampilan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala desa. Administrasi atau dokumen desa harus diselesaikan dengan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelayanan kepada masyarakat (Waruwu *et al.*, 2023). Kompetensi perangkat desa menjadi faktor kunci dalam efektivitas penyelesaian administrasi, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas administrasi (Kamelia & Pratiwi, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Bawosalo'o Dao-Dao mengalami perkembangan baik dalam infrastruktur maupun sumber daya manusia. Namun, tantangan dalam penyelesaian administrasi masih sering terjadi, seperti keterlambatan pengurusan dokumen, ketidakjelasan prosedur administrasi, serta kurangnya koordinasi antar perangkat desa, yang menjadi keluhan masyarakat (Damapolii *et al.*, 2022). Efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya,

kompetensi perangkat desa, serta sistem dan prosedur yang diterapkan (Defriansyah, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerja perangkat desa, mengevaluasi kinerja mereka dalam menyelesaikan administrasi desa, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi.

Tinjauan Literatur

Konsep Efektivitas Kerja

Menurut Syam (2020) dalam Cindy Cenora (2022), efektivitas kerja adalah suatu kejadian yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam manajemen, seperti jumlah produk, kualitas produk, dan ketepatan waktu. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Agung Kurniawan (Zulfikri & Abdul, 2020) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan fungsi dan tugas organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Sedangkan Hidayat (2006) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana target kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas kerja merupakan keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Siagin (2019), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa melalui kegiatan yang telah dijalankan. Robbins (dalam Siagin, 2019) juga menyatakan bahwa efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling sesuai atau tepat dan mampu memberikan manfaat secara langsung. Admosoeprapto (2016) menyebutkan beberapa tolak ukur yang dapat dijadikan indikator efektivitas kerja, di antaranya:

- 1) Kualitas
- 2) Kuantitas
- 3) Ketepatan Waktu
- 4) Efektivitas

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Susunan tata kerja pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, yang mencakup beberapa bagian sebagai berikut:

1) Sekretaris Desa

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa terdiri dari beberapa urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur) (Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3, Permendagri No. 84, 2015).

2) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, memperhatikan luas wilayah, karakteristik geografis, kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dijalankan oleh kepala dusun atau sebutan lainnya. Tugas kewilayahan mencakup penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari beberapa seksi, seperti seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan (Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, Permendagri No. 84, 2015).

Kompetensi dan kualifikasi perangkat desa adalah kemampuan dan persyaratan yang harus dimiliki oleh aparat desa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melayani masyarakat desa dan mendukung pengelolaan pemerintahan desa (Kamelia & Pratiwi, 2022).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengenai Efektivitas Kerja Perangkat Desa dalam Penyelesaian Administrasi di Desa ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengutamakan pengumpulan data di lapangan dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Menurut Dasim (2020), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena peneliti memiliki alasan kuat, yaitu lebih mudah berhadapan dengan kenyataan dan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2017), "dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus 'divalidasi' seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian dan selanjutnya terjun ke lapangan." Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen mencakup validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti perlu menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Efektivitas Kerja Perangkat Desa dalam Penyelesaian Administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao

Kualitas kerja perangkat desa di Desa Bawosalo'o Dao-Dao tergolong cukup baik dalam menyelesaikan administrasi, meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Mereka bekerja keras dan memahami tanggung jawab mereka, serta berusaha melibatkan perangkat desa dalam pelatihan untuk meningkatkan

kompetensi mereka. Namun, masih ada kekurangan dalam pengoperasian komputer. Beberapa dokumen administrasi mengandung banyak kesalahan dalam pengetikan atau data yang tidak akurat karena kurangnya perhatian terhadap detail. Beberapa perangkat desa belum sepenuhnya menguasai sistem digital, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi. Andrianus Laia, Sekretaris Desa, menekankan pentingnya kualitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi, dengan menyatakan bahwa: "Kualitas kerja perangkat desa mencerminkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas administrasi sesuai standar yang ditetapkan. Di Desa Bawosalo'o Dao-Dao, kualitas kerja perangkat desa dinilai cukup baik dalam hal akurasi data, kesesuaian dokumen administrasi, serta kemampuannya untuk memahami dan mengikuti prosedur administrasi. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek inovasi dan efisiensi kerja. Kendala utama terletak pada kurangnya fasilitas pendukung, seperti komputer dan perangkat lunak administrasi yang memadai, sehingga menghambat efisiensi kerja."

Pelayanan administrasi di desa menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jenis pelayanan yang paling diminati adalah pembuatan surat pengantar KTP, Kartu Keluarga (KK), serta berbagai jenis surat lainnya, seperti surat keterangan domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Surat-surat ini sering dibutuhkan oleh mahasiswa untuk keperluan pendaftaran kuliah atau pengurusan beasiswa. Masyarakat desa menyatakan bahwa meskipun jumlah pelayanan administrasi yang diberikan perangkat desa cukup banyak, terkadang tidak terorganisir dengan baik. Ada saat di mana pelayanan tidak dilakukan sesuai prioritas, dan tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga pelayanan menjadi lambat. Selain itu, jumlah pelayanan yang dapat diselesaikan dalam sehari tidak terlalu konsisten, karena perangkat desa sering kali tidak hadir penuh waktu di kantor. Mengenai ketepatan waktu, perangkat desa Bawosalo'o Dao-Dao sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, beberapa pekerjaan masih mengalami keterlambatan karena masalah teknis. "Ketepatan waktu sebenarnya cukup baik, tetapi ada beberapa kasus di mana

masyarakat harus menunggu lebih lama, terutama jika dokumen yang dibutuhkan memerlukan tanda tangan kepala desa yang sedang tidak ada di tempat." Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu perangkat Desa Bawosalo'o Dao-Dao dalam menyelesaikan administrasi pemerintahan tergolong cukup baik. Namun, kendala teknis, seperti ketidakhadiran kepala desa untuk menandatangani dokumen penting, menjadi faktor penyebab keterlambatan dalam beberapa kasus. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, penggunaan fasilitas kantor sudah berusaha dilakukan secara efektif, baik dalam pengelolaan administrasi maupun penggunaan fasilitas yang ada. Meskipun demikian, ada kendala seperti keterbatasan alat tulis, komputer yang sering bermasalah, dan koneksi internet yang lambat. "Kami berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada," ujar kepala desa. Meski demikian, masyarakat setempat menganggap perangkat desa cukup efektif dalam menangani urusan yang mendesak, meskipun terkadang ada kesan bahwa beberapa perangkat desa kurang sigap jika tidak ada supervisi langsung dari kepala desa.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Perangkat Desa dalam Penyelesaian Administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao

Berdasarkan wawancara, kemampuan perangkat desa dalam menyelesaikan tugas administrasi cukup baik, meskipun terdapat beberapa keterbatasan. Kepala desa menjelaskan bahwa beberapa perangkat desa masih membutuhkan pelatihan khusus, terutama dalam pengelolaan teknologi informasi, seperti penggunaan komputer dan aplikasi administrasi. Sekretaris desa menambahkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan keterampilan perangkat desa melalui pelatihan internal, meskipun pelatihan ini belum rutin dilakukan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, faktor disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja perangkat desa. Kaur Umum mengungkapkan bahwa masih ada perilaku yang tidak mendukung produktivitas kerja, seperti merokok atau bercengkerama selama jam kerja. Hal ini menunjukkan perlunya

peningkatan kesadaran akan disiplin kerja dan pengelolaan waktu agar tugas administrasi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan. Fasilitas kantor desa menjadi salah satu kendala utama dalam mendukung efektivitas kerja perangkat desa. Berdasarkan keterangan kepala desa dan Kasi Pelayanan Desa, terdapat keterbatasan dalam hal alat tulis, jumlah komputer yang hanya dua unit, dan koneksi internet yang lambat. Meski begitu, perangkat desa berusaha mengoptimalkan fasilitas yang ada dengan sistem kerja bergantian.

Tingkat pendidikan perangkat desa dianggap cukup memadai untuk menjalankan tugas administrasi, meskipun beberapa perangkat masih memerlukan pendampingan dalam memahami regulasi baru atau aplikasi administrasi. Sekretaris desa menyampaikan bahwa peningkatan pendidikan formal atau pelatihan berkelanjutan dapat membantu perangkat desa lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya. Senada dengan itu, Kasi Pemerintahan Desa Bawosalo'o Dao-Dao mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi adalah faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah dapat menghambat kemampuan perangkat desa dalam memahami tugas dan fungsinya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, perangkat desa akan lebih mudah memahami tugas dan kewajibannya, yang penting dalam melayani masyarakat dengan lebih baik.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas kerja perangkat desa, yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, fasilitas pendukung, serta faktor internal seperti pelatihan dan disiplin kerja. Kualitas kerja perangkat desa di desa ini menunjukkan kemajuan meskipun terbatas oleh sumber daya yang ada. Sebagian besar perangkat desa berusaha bekerja dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan. Namun, masalah penguasaan teknologi masih menjadi kendala, terutama

dalam penggunaan komputer dan sistem digital, yang menyebabkan kesalahan dalam pengetikan serta ketidakakuratan data pada beberapa dokumen administrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Arsjad (2018) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pelatihan aparat desa sangat memengaruhi keberhasilan administrasi. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi juga menjadi masalah yang cukup signifikan meskipun kualitas kerja dalam beberapa aspek, seperti akurasi dokumen, sudah cukup baik. Selain itu, pelayanan administrasi yang diberikan perangkat desa juga menunjukkan adanya kekurangan dalam pengorganisasian, seperti yang dijelaskan oleh Catur Budiarti (2024), yang menyebutkan pentingnya pengelolaan administrasi yang terorganisir. Meskipun jenis pelayanan yang diberikan cukup banyak, terkadang tidak dilakukan sesuai prioritas dan tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga memengaruhi kecepatan pelayanan. Kendala ketepatan waktu juga muncul karena masalah teknis, seperti ketidakhadiran kepala desa untuk menandatangani dokumen penting.

Dewi (2022) menyarankan bahwa koordinasi yang baik antara aparat desa dapat mempercepat proses administrasi. Fasilitas kantor desa yang terbatas juga menjadi hambatan, terutama terkait dengan alat tulis, komputer, dan koneksi internet yang lambat. Brotoharsojo *et al.* (2003) menekankan bahwa fasilitas yang memadai akan meningkatkan kinerja organisasi, dan hal ini sangat relevan dengan keadaan di desa tersebut, di mana keterbatasan fasilitas menghambat efisiensi kerja perangkat desa. Meskipun demikian, perangkat desa berusaha mengoptimalkan fasilitas yang ada dengan menggunakan sistem kerja bergantian, seperti yang ditemukan oleh Damapoli *et al.* (2022). Peningkatan teknologi yang lebih baik, seperti penggunaan perangkat lunak administrasi yang lebih canggih, dapat mempercepat dan mempermudah pengelolaan administrasi desa. Selain itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memastikan perangkat desa memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka. Kamelia & Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi perangkat

desa dalam melaksanakan tugas mereka. Meskipun tingkat pendidikan perangkat desa cukup memadai, beberapa perangkat desa masih membutuhkan pendampingan, terutama dalam pengelolaan teknologi dan pemahaman regulasi baru. Peningkatan pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan akan membantu perangkat desa dalam menjalankan tugas administrasi dengan lebih baik. Selain itu, disiplin kerja juga berpengaruh besar terhadap efektivitas kerja perangkat desa. Beberapa perangkat desa masih menunjukkan perilaku yang mengganggu produktivitas kerja, seperti merokok dan bercengkerama selama jam kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan disiplin kerja perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa tugas administrasi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan. Fitriani (2022) menyarankan bahwa disiplin kerja yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap kinerja, dan hal ini juga berlaku di lingkungan pemerintahan desa. Secara keseluruhan, meskipun perangkat desa di Desa Bawosalo'o Dao-Dao telah menunjukkan upaya maksimal dalam menjalankan tugasnya, masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan masalah disiplin kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif, meningkatkan fasilitas yang tersedia, dan memperbaiki disiplin kerja agar perangkat desa dapat bekerja lebih efektif dalam menyelesaikan administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kesimpulan

Tingkat efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao dapat dilihat dari Kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan administrasi, ketepatan waktu, dan efektivitas penggunaan fasilitas kantor. Dalam pelaksanaannya masih terdapat perangkat desa yang tidak tepat menyelesaikan pekerjaannya seperti pembuatan surat-surat yang diminta masyarakat, sehingga dapat membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun secara keseluruhan, Aparatur Desa Bawosalo'o Dao-Dao telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penyelesaian administrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja perangkat desa dalam penyelesaian administrasi di Desa Bawosalo'o Dao-Dao yaitu factor Kemampuan atau Keterampilan SDM, faktor fasilitas sarana dan prasarana, faktor pendidikan, faktor disiplin dan pengelola waktu, faktor usia dan kondisi fisik. Pemerintah Desa Bawosalo'o Dao-Dao Perlu diadakan pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pelayanan teknis kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alaslan, A., Aman, A. P. O., & Suharti, B. (2021). Kemampuan pemerintah desa dan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan.
- Amalia, R., & Nadirsyah, N. (2017). *Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)* (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University).
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa karyamukti kecamatan mootilango kabupaten gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16-32.
- Brotoharsojo, H., & Wungu, J. (2003). Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Catur Budiarti, C. B. (2024). *STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELURAHAN KARANGREJO TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DI KANTOR KELURAHAN KARANGREJO SEMARANG* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
- Damapoli, A., Nayoan, H., & Sumampow, I. (2022). Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian, Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(1).
- Defriansyah, D. (2023). *Fungsi Aparatur Kantor Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin* (Doctoral dissertation, Universitas Ekasakti Padang).
- Fitriani, S. (2022). *Pengaruh Motivasi Kerja, Beban Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Dki Cabang Juanda)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- GIRSANG, D. D. (2023). PENGARUH USIA, MASA KERJA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI.
- Herman, H., Tawakal, F., Indra, I., Puadji, F., Setianingsi, E., Sa'ban, L. A., & Hastuti, H. (2020). Pembinaan administrasi desa di desa wajajaya. *Integritas*, 4(1), 415898.
- Kamelia, K., & Pratiwi, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja pegawai Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bima. *Jurnal Dimensi*, 11(2), 364-385.
- Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Nidyawati, N. (2022). Pengaruh sikap dan keterampilan terhadap kualitas kerja pegawai bagian perlengkapan Setda Kabupaten Lahat. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1).

- <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1755>.
- Paresha, G. G. (2023). EFEKTIVITAS KERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA BANJARANYAR KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS.
- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik.
- Rahmawati, A. D., & Fatmawati, A. (2020). Sistem Administrasi Desa Mendiwo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Berbasis Web. *Jurnal Teknik Elektro*, Vol, 20.
- Resmanasari, D. (2022). Pengaruh Komitmen dan Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Bagian Prokopim. *Jurnal Ekonomak*, 8(2), 13-24.
- Sulaeman, E., Hendriana, A., Sakti, B. R. P., & Abdullah, A. (2024). PENGARUH KOMPETENSI DAN PELATIHAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DI PT CIOMAS ADISATWAFURTHER PROCESS (FP) UNIT PARUNG. *JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN PEMASARAN*, 2(2), 96-104.
- Tahir, N. (2018). Efektivitas layanan pajak pada kantor pelayanan Penyuluhan dan konsultasi perpajakan benteng Kabupaten kepulauan selayar Ilmu Administrasi Negara. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Waruwu, M. H., & Halawa, O. (2024). ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA HILIBADALU KECAMATAN SOGAE'ADU KABUPATEN NIAS. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1747-1757.
- <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1654>.
- Waruwu, M. H., Gulo, S., Lahagu, P., Halawa, O., & Laia, O. (2023). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 44-47.
- Welikin, K. P., & Mayvita, P. A. (2021). Strategi Mengembangkan Keterampilan Dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Di Ud. *BINA BERSAMA BANJARMASIN PADA MASA PANDEMI COVID-19 STRATEGI MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN DAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DI UD. BINA BERSAMA BANJARMASIN PADA MASA PANDEMI COVID-19. Universitas Islam Kalimantan MAB*.